

TAJUK RENCANA

Soal Golput dalam Pilkada

PADA Rabu 27 November mendatang kita akan berpesta demokrasi lagi, yaitu melakukan pemungutan suara untuk memilih kepala daerah atau Pilkada. Persiapan menuju momentum itu saat ini masih terus dilakukan. Pada Minggu 22 September nanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pasangan calon (Paslon) yang akan berlaga dalam Pilkada. Kemudian mulai 25 September sampai 23 November para paslon dipersiapkan melakukan kampanye.

Meski masih dua bulan lebih untuk sampai waktu pemungutan suara, namun belakangan ini muncul suar-suar atau wacana untuk tidak memilih atau golput (golongan putih), baik dengan tidak datang ke tempat pemungutan suara, mencoblos gambar semua pasangan, atau tidak mencoblos sama sekali (abstain). Bahkan pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, gerakan golput, baik yang mengajak abstain atau mencoblos semua calon, tidak boleh dikriminalisasi. Menurutnya, itu adalah ekspresi politik yang tidak boleh dikriminalisasi (KR, Kamis 19/9).

Tentu saja pendapat ini mendapat respon dari berbagai pihak. Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan masyarakat mengekspresikan pilihannya pada Pilkada Serentak tahun 2024. Namun tetap berharap banyak yang memilih kepala daerah. Ia juga berharap masyarakat tidak mencoblos semua gambar paslon, karena itu berarti merusak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Dalam perspektif agama Islam, memilih pemimpin termasuk wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah meminta, ketika berdua, hendaklah memilih salah satunya sebagai pemimpin. Begitu juga ketika bertiga dan seterusnya dalam kelompok lebih banyak. Kita juga bisa bayangkan bagaimana kacaunya ketika dalam suatu wilayah tidak mempunyai pemimpin, karena tidak ada yang mengatur, memimpin,

atau bertanggungjawab terhadap suatu wilayah.

Apalagi dalam wilayah seluas kabupaten/kota, atau bahkan provinsi, kalau tidak ada yang memimpin bagaimana jadinya. Dalam regulasi yang ada saat, yang memilih para pemimpin wilayah tersebut adalah rakyat (kecuali provinsi DIY yang merupakan daerah istimewa). Karena yang menentukan siapa yang layak memimpin adalah rakyat, maka saat pemungutan suara mestinya semua rakyat di wilayah tersebut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya.

Di antara paslon yang ada, pasti ada yang layak memimpin, meski masing-masing pasti mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Biasanya mereka adalah kader terbaik di suatu wilayah. Selanjutnya rakyat bebas memilih siapa di antara paslon yang dianggap paling baik. Kemudian sesuai asas demokrasi, paslon yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan menjadi kepala daerah dan semua rakyat harus menerima, meski tidak sesuai pilihannya.

Menjelang Pemilu Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beberapa waktu lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan golput. Alasannya antara lain karena memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* (kepemimpinan) dan *imarah* (pemerintahan) dalam kehidupan bersama. Sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. MUI dalam hal ini mengutip qaul sahabat nabi Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, dan pendapat al-Mawardi yang menyatakan penekanan kepemimpinan hukumnya wajib (*faridhu kifayah*).

Karena itu sebaiknya kita tidak golput. Agar masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya saat Pilkada serentak nanti, kira perlu peran aktif para pemuka dan tokoh masyarakat. Organisasi seperti MUI dan juga organisasi keagamaan lain kiranya juga perlu mengeluarkan fatwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada nanti. (*)-d

Kepribadian Muhammadiyah

SALAH satu kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap Muhammadiyah adalah mulai pudarnya independensi Muhammadiyah terhadap negara, apalagi Muhammadiyah dalam konsolidasi nasional beberapa waktu lalu bersedia menerima konsensi tambang dari pemerintah. Nalar kritis Muhammadiyah dianggap sudah terkooptasi oleh kepentingan politik dan oligarki sehingga Muhammadiyah sudah tidak lagi menjadi kekuatan moral penuntun arah bangsa. Kekhawatiran itu tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi dari kalangan intern Muhammadiyah juga bermunculan, Tulisan Prof Zuly Qodir misalkan di Media Indonesia (28 Agustus 2024) dengan Judul Muhammadiyah Menghadang Pemburu Kekuasaan dan Kerakusan, menyoroti pemberian konsesi tambang dan terbaca jelas kekhawatiran terhadap sikap kritis Muhammadiyah tersebut.

Jawab atas Kekhawatiran
Sebenarnya kekhawatiran sebagian masyarakat tersebut terjawab sudah dengan pidato kebangsaan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir menjelang peringatan kemerdekaan RI ke 79 dengan judul "Indonesia Bernyawa Indonesia Raya". Prof Haedar dengan sangat lugas mengkritik elite bangsa yang tidak bisa bertindak sebagai negarawan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Tidak cukup itu, ketika terjadi polemik keputusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang kemudian ketika DPR dan pemerintah tidak akan mengindahkan keputusan MK tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti, mewakili organisasi bersuara agar DPR dapat tunduk dan patuh pada keputusan MK. Membaca dan memahami kedua pernyataan, baik oleh Prof Haedar Nashir maupun Prof Abdul Mu'ti, jelaslah menunjukkan bahwa persyarikatan ini tetap pada jalurnya sebagai kekuatan moral yang menuntun bangsa Indonesia.

Kepribadian Muhammadiyah
Bagaimana memahami pola hubungan Muhammadiyah dengan kekuasaan

Arif Jamali Muis

? dan bagaimana Muhammadiyah memerankan fungsinya sebagai kekuatan moral keagamaan penuntun arah bangsa ini? Pola hubungan tersebut dapat kita pahami melalui dokumen resmi organisasi, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Dari 10 sifat Muhammadiyah paling tidak kita dapatkan 3 kepribadian Muhammadiyah yang dapat memberikan gambaran po-



KR-JOKO SANTOSO

sisi Muhammadiyah dalam kerangka hubungan dengan pemerintah.

Pertama, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Sifat ini menandakan bagaimana Muhammadiyah bersikap atas segala produk hukum yang berlaku di Republik ini, dalam konteks itulah pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti berkaitan dengan hasil sidang MK dapat kita pahami. Bagi Muhammadiyah, jika keputusan tersebut telah menjadi keputusan final dan merupakan produk hukum yang sah, maka Muhammadiyah patuh dan menghormati. Bagi Muhammadiyah, produk MK yang berkaitan dengan pilkada merupakan sah dan wajib untuk didukung walaupun berhadapan dengan kepentingan-kepentingan DPR dan Pemerintah.

Kedua, membantu pemerintah serta

bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Kepribadian Muhammadiyah adalah membantu pemerintah dan tentu saja bekerjasama dengan pemerintah dan bahkan bisa jadi menerima bantuan dari pemerintah. Salah pikir jika sebagian kelompok menginginkan Muhammadiyah menjadi oposisi dan selalu mengkritik pemerintah. Bagi Muhammadiyah, jika program-program pemerintah baik untuk kemalahaan umat tentu perlu didukung bahkan bekerjasama untuk menyukseskan program tersebut.

Ketiga, bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana. Inilah model Muhammadiyah memberikan kritik kebijakan pemerintah. Jangan berharap Muhammadiyah menyampaikan kritik dengan nada keras seperti LSM kebanyakan. Lihatlah bagaimana Prof Haedar Nashir atau Prof Abdul Mu'ti memberikan masukan ke pemerintah dengan bahasa yang santun tetapi secara substansi mengena dan tidak ada yang merasa tersakiti. Itulah Muhammadiyah yang akan selalu kritis terhadap pemerintah jika itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, tetapi pada saat yang sama bisa juga bekerjasama ketika itu untuk kemaslahatan umum. *Walahu ailm bish-showab.* (*)-d

**Arif Jamali Muis, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan Guru Matematika SMAN 5 Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yurinya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TK Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Hilangnya Integritas...

MERDEKA!

Harus diakui dengan jujur bahwa Republik Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Para pemimpin kehilangan integritas secara bersama atau sendiri, disengaja maupun tidak disengaja. Korupsi terjadi segala bidang, baik yang berskala "ikan teri" maupun "ikan paus". Integritas adalah etika tertentu yang dianut orang untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan moralitas. Integritas dicirikan dengan disiplin, tanggung jawab, jujur, kerja keras, tidak mencuri, satunya kata dengan perbuatan, dan lain-lain.

Integritas dapat diartikan sebagai praktik melakukan hal yang benar setiap saat. Yaitu melakukan apa yang secara moral benar. Secara sederhana, orang yang berintegritas memilih untuk melakukan hal yang benar setiap saat.

Di antara orang-orang penting yang kita harapkan untuk bertindak dengan integritas adalah pejabat publik. Sistem pemerintahan di Indonesia banyak melibatkan politisi untuk menduduki jabatan penting tersebut. Ketika politisi berkampanye untuk jabatan publik, mereka membuat banyak janji dan klaim tentang apa yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih. Sayangnya, kebanyakan politisi membuat banyak janji ketika kampanye yang tidak mampu mereka laksanakan ketika terpilih. Hal ini menggerus integritas mereka dan secara serius memperlemah peluang mereka untuk terpilih kembali.

Orang yang tidak berintegritas akan mengambil keputusan berdasarkan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompoknya, bukan berdasarkan manfaatnya masyarakat umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Ciri orang yang mudah kehilangan Integritas

1) Mereka sering mengingkari janji
Salah satu tanda paling terlihat dari orang yang kurang memiliki integritas adalah kecenderungannya untuk mengingkari janji. Hal ini biasanya bermula dari ketidaksesuaian antara perkataan dan tindakannya.

2) Mereka cenderung menyalahkan orang lain

Retno Triani Soekono

Ciri kuat lainnya dari orang yang tidak memiliki integritas adalah kebiasaan mereka menyalahkan orang lain.

3) Mereka sering memanipulasi situasi demi keuntungan mereka

Manipulasi merupakan karakteristik yang sering ditemukan pada orang yang tidak memiliki integritas.

Integritas sejati bukanlah tentang memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi, tetapi tentang bersikap jujur.

4) Mereka tidak konsisten

Ketidakkonsisten merupakan ciri orang yang kurang berintegritas. Perkataan, tindakan, dan perilaku mereka cenderung berubah-ubah berdasarkan kebutuhan atau keadaan mereka saat itu.

Mereka adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Inti dari integritas terletak pada konsistensi. Hal ini tentang keteguhan pada prinsip kebenaran moral, terlepas dari situasi atau orang-orang di sekitarnya.

5) Mereka memiliki acuan moral yang fleksibel (mudah berubah)

Orang-orang ini tidak memiliki integritas karena standar etika mereka berubah berdasarkan kenyamanan mereka, bukannya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran yang konsisten.

6) Mereka sering membenarkan tindakan mereka

Ciri paling menonjol dari orang yang tidak berintegritas adalah kebiasaan mereka membenarkan tindakan mereka.

Bukannya mengakui kesalahan mereka atau menerima tanggung jawab, mereka sering membuat alasan untuk membenarkan perilaku mereka.

7) Mereka tidak memiliki empati

Penelitian telah menunjukkan hubungan langsung antara empati dan perilaku etis. Sebuah studi yang diterbitkan dalam *Journal of Business Ethics* menemukan bahwa individu dengan tingkat em-

pati yang tinggi cenderung lebih menunjukkan perilaku etis daripada mereka yang tingkat empatinya lebih rendah.

8) Mereka tidak jujur.

Kejujuran dalam tindakan diperlukan dalam menegakkan integritas. Kejujuran ini berkaitan dengan perilaku "tidak mencuri". Mencuri waktu, atau barang yang "sepele" atau uang dalam jumlah kecil merupakan tanda-tanda awal yang kuat dari orang yang tidak berintegritas. Kebiasaan mencuri "ringan" tanpa diketahui orang lain akan menjadi kebiasaan yang mengakar kuat dalam diri mereka tumbuh menjadi pencurian dalam jumlah besar tanpa rasa bersalah.

Dengan munculnya tanda-tanda tersebut di atas pada diri seseorang, kemungkinan besar telah terjadi hilangnya Integritas pada diri orang tersebut. Perilaku tercela ini bisa dilihat saat ini maupun dari rekam jejak orang yang bersangkutan. Hal ini sangat penting untuk menjadi acuan, terutama saat memilih pejabat publik pemegang otoritas daerah dari tingkat walikota, bupati maupun gubernur yang akan berlangsung sebentar lagi.

"Kebesaran seseorang tidak terletak pada seberapa banyak kekayaan yang ia miliki, tetapi pada integritasnya dan kemampuannya untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya." -Bob Marley. (*)-d

**Retno Triani Soekono, Psikolog.*

Pojok KR

Muhammadiyah bakal dirikan kantor di IKN.
- Ormas lain pasti juga sudah merencanakan.

Kenalkan wayang kulit lewat olahraga.
- Kreativitas yang pantas diaicungi jempol.

KPPS harus terbebas dari parpol.
- Memang rawan adanya penyusupan.

Beraksi